

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Negara saat ini tak lepas dari campur tangan pihak-pihak yang mengelola sumber daya alam baik dari Instansi Pemerintah maupun Swasta. Perekonomian Negara juga berkaitan dengan kontribusi daerah terhadap Pendapatan Negara yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap-tiap daerah.

Perekonomian daerah merupakan tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kinerja yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Daerah, khususnya di bidang perekonomian dan pendapatan daerah. Suatu daerah, dapat dikatakan berkembang bahkan maju, dilihat dari pendapatan daerah per tahun. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah setiap tahunnya dan dapat membangun infrastruktur untuk mengembangkan daerah yang berguna untuk masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu daerah atau wilayah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi itu sendiri dan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang terealisasi terhadap penerimaan pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatn asli daerah.

Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut dimaksudkan untuk menghimpun dan menyediakan dana sebesar-besarnya guna kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan kegiatan pembangunan di daerah sangat tergantung dari kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah kabupaten/kota sangat disadari oleh Pemerintah daerah. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah kota.

Pemerintah Pusat melakukan reformasi Undang-undang otonomi yang ditandai dengan adanya Undang-undang No. 12 Tahun 2008, dimana Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, dimana sebelum UU ini berlaku, Otonomi Daerah mengacu pada Undang-

undang No. 5 Tahun 1974 yang peraturan pelaksanaannya baru dibuat pada tahun 1992 melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat daerah tingkat II.

Pelaksanaan otonomi yang ditandai dengan berlakunya undang-undang No. 22 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001, mencakup banyak aspek yang masing-masing saling berkaitan, seperti aspek keuangan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang didalamnya terdapat sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi focus dalam penelitian ini.

Sumber pendapatan asli daerah yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang kini menjadi Undang-undang No.12 Tahun 2008 memiliki objek yang sama yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD) dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menunjukkan keseriusan Pemerintah Pusat dalam memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah. Keseriusan ini ditandai dengan direvisinya Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah menjadi Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Menurut Undang-undang ini terdapat 11 jenis Pajak Daerah dan 3 Retribusi Daerah yang dipungut oleh Daerah. Isi pokok dari perubahan Undang-undang ini adalah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak perlu mendapat pengesahan Pemerintah Pusat, selain itu Pemerintah Daerah dierikan kebebasan untuk

membuat Pajak dan Retribusi dari yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000.¹

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 diatas dapat dilihat bahwa pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah ang menunjang pendapatan asli daerahnya sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerahnya semaksimal mungkin.

Bisnis.com, TANGERANG — Realisasi pajak daerah Provinsi Banten tergerus 21,9% menjadi Rp800,41 miliar pada kuartal I/2016 dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Mengutip data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, Pemprov Banten menargetkan pajak daerah pada tahun ini senilai Rp4,98 triliun atau naik dari target 2015 yakni Rp4,94 triliun. Sebaliknya, realisasi pajak daerah secara nilai maupun penyerapan masih lebih tinggi periode Januari-Maret 2015 sebesar Rp1,02 triliun atau terserap 21%. “Kami sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot realisasi pajak daerah sepanjang tahun, salah satunya dengan memperkuat koordinasi antara provinsi dengan pemkab/pemkot,” kata Kepala DPPKD Banten Nandy S Mulya kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang di dalamnya terdapat komponen pajak daerah, merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Rendahnya alokasi anggaran pada tahun ini disebabkan daya serap rendah terhadap bantuan keuangan di kabupaten/kota. “Dalam waktu dekat, DPPKD akan membuka layanan loket prima di UPT. Jadi, dalam UPT yang

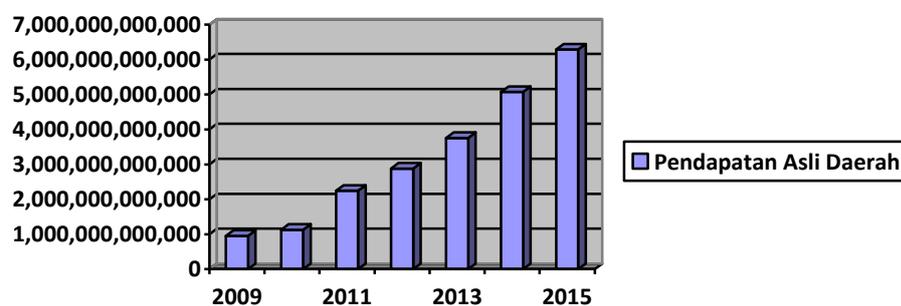
¹ Anggito Abimayu, Evaluasi UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan BAPEKI, 2005), p. 14.

terpilih tersebut, para WP bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ringan, pangas rambut, ruang laktasi, ruang konseling, dan kursi pijat elektrik saat membayar pajak,” pungkasnya. Untuk menjaring lebih banyak WP, DPPKD berencana menggelar kembali Program Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB. Program serupa juga pernah diadakan pada tahun lalu. Selain menggali potensi pajak kendaraan bermotor, DPPKD Banten juga akan menggali pajak nonkendaraan bermotor yakni pajak yang berasal dari perusahaan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, DPPKD bekerja sama dengan BPKP dengan melakukan survei terkait potensi pajak perusahaan dan retribusi di Banten. "PKB-BBNKB merupakan sandaran untuk pembangunan, jika PKB-BBNKB lesu, dan pembelian lesu, maka PAD juga akan ikut lesu. Banten punya kurang lebih 12.000 perusahaan, seharusnya ini bisa dimaksimalkan," tekan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta.²

Berdasarkan Bisnis.com dapat dilihat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk bisa mencapai pertumbuhan pendapatan asli daerah. Untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan dari tingkat pendapatan asli daerah perlu kesadaran masyarakat untuk dapat ingat kewajibannya untuk membayar pajak dikarenakan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan asli daerah suatu daerah, jika pendapatan pajakna mengalami peningkatan maka akan sangat membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah tersebut.

² Andhika Anggoro Wening, *Realisasi Pajak Daerah Banten Turun, Ini Penyebabnya*, <http://finansial.bisnis.com/20160605/realisasi-pajak-daerah-banten-turun-ini-penyebabnya> (diakses pada 16 juni 2016)

Pendaatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang empengaruhi tingkat pendapatan di suatu daerah. Khususnya di pulau jawa yang sedang banyak melakukan pembangunan. Tingkat pendapatan antar provinsi dipulau jawa perlu diperhatikan, khususnya provinsi Banten yang merupakan salah satu penerima pendapatan daerah terendah di pulau jawa.

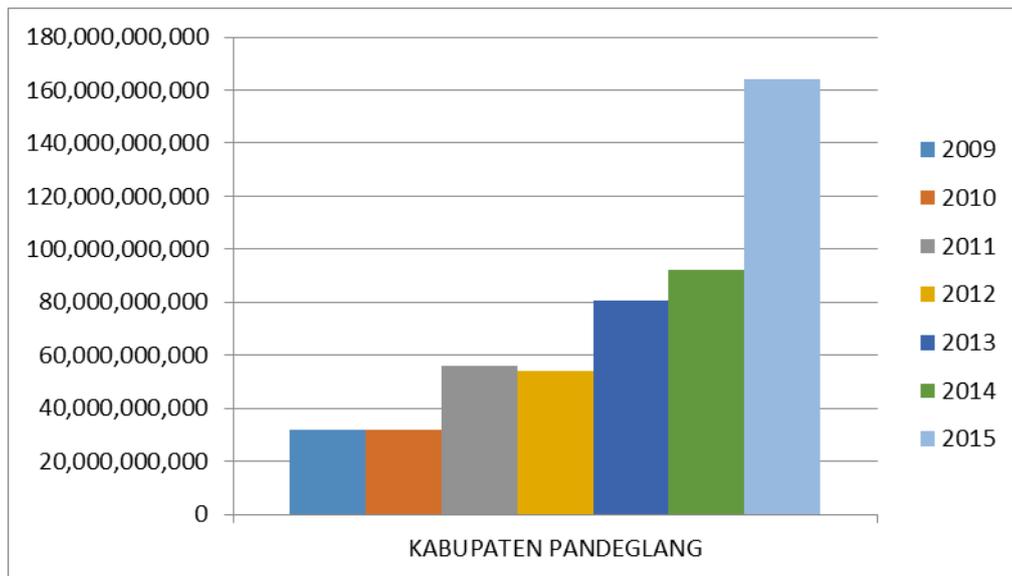


Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Gambar I. 1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten Tahun 2009-2015

Data pada gambar tersebut merupakan data pendapatan asli daerah di Provinsi Banten selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya, yaitu pada tahun 2009 sebesar 950 miliar, kemudian tahun 2010 naik menjadi 1,2 triliun, tahun 2011 menerima pendapatan sebesar 2,2 triliun, tahun 2012 menerima pendapatan sebesar 2,8 triliun, tahun 2013 mengalami peningkatan lagi sebesar 3,7 triliun, pada tahun 2014 tingkat pendapatannya mencapai 5,07 triliun, dan pada tahun 6,2 triliun. Namun jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan daerah antar provinsi dipulau jawa, pendapatan daerah Provinsi Banten merupakan salah satu yang terendah. Banten merupakan provinsi termuda di pulau jawa bisa dijadikan acuan mengapa menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pendapatan terendah di pulau jawa.

Pendapatan asli daerah Provinsi banten selalu naik tiap tahunnya, namun jika dilihat pendapatan asli daerah tiap daerah tiap Kabupaten/Kota di provinsi banten maka dapat dilihat seperti pada gambar berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar I. 2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2009-2015

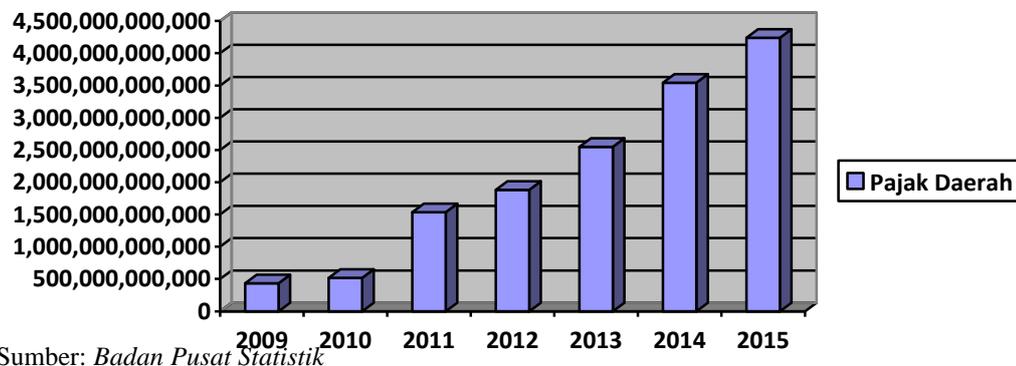
Data pada gambar tersebut merupakan data pendapatan asli daerah salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang yang merupakan salah satu penyumbang tingkat pendapatan asli daerah terendah di Provinsi Banten. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat pendapatan asli daerah di Kabupaten Pandeglang mengalami ketidak stabilan. Pada tahun 2009 tingkat pendapatan asli daerah kabupaten pandeglang sebesar 31,9 miliar, kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 31,8 miliar, pada tahun 2011 mengalami peningkatan lagi menjadi 56,1 miliar, namun pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi 54 miliar, lalu pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi 80,5 miliar, tahun 2014 kembali meningkat

menjadi 92,3 miliar, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 163,9 miliar.

Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat pendapatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah. asli daerah diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah. Selain kedua faktor tersebut pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh

Faktor pertama adalah Pajak daerah. Pajak adalah salah satu sumber pemasukan terbesar dalam perekonomian tiap daerah bahkan setengah dari pemasukan suatu daerah berasal dari pajak. Bahkan dalam tingkat pemasukan untuk meningkatkan jumlah pendapatan suatu daerah pajak daerah merupakan faktor yang besardan cukup mempengaruhi tingkat pendapatan suatu daerah.

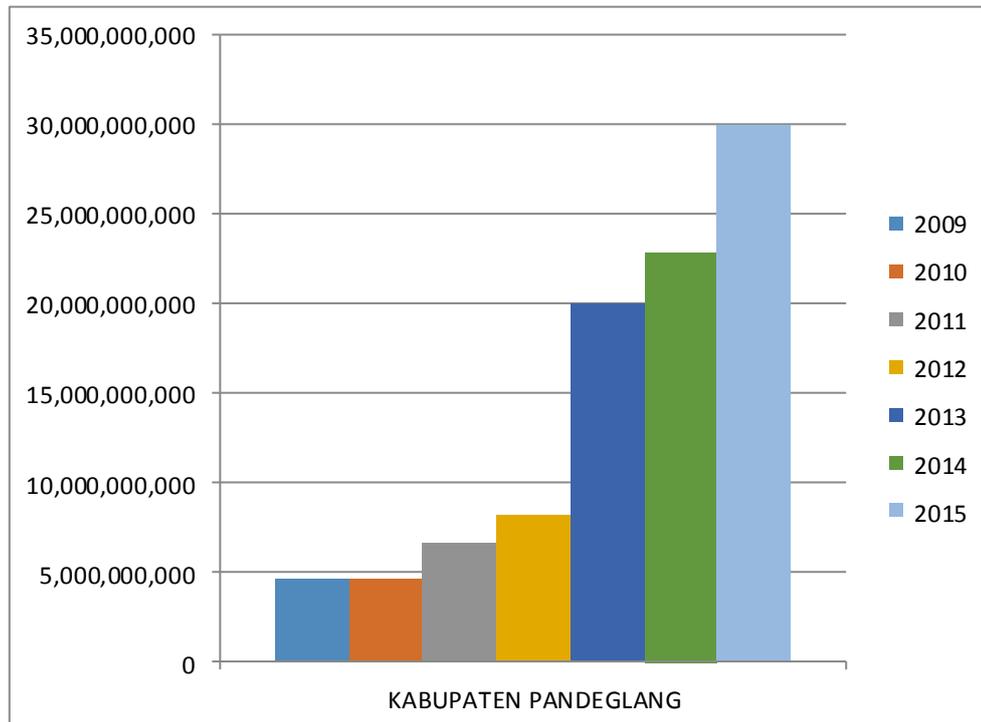
Tingkat pertumbuhan pajak daerah di Provinsi Banten adalah salah satu yang mempengaruhi pendapatan provinsi mengalami kenaikan atau penurunan. Merut data yang dilansir tingkat pendapatan pajak daerah provinsi Banten adalah sebagai berikut :



Gambar I. 3
Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2009-2015

Data pada gambar tersebut dapat menjelaskan tingkat pendapatan pajak daerah Provinsi Banten mengalami kenaikan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2009 memroler pajak daerah sebesar 430 miliar, kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 516 miliar, pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 1,5 triliun, tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 1,8 triliun, pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 2,5 triliun, pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 3,5 triliun, dan pada tahun 2015 4,2 triliun.

Data diatas merupakan data akhir yang diterima Provinsi Banten setelah disatukan dari tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Namun jika kita melihat berdasarkan data penerimaan Pajak daerah setiap Kabupaten/Kota ang ada di Provinsi Banten, maka kita dapat melihat data salah satu Kabupaten/Kota ang ada di Provinsi Banten sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik

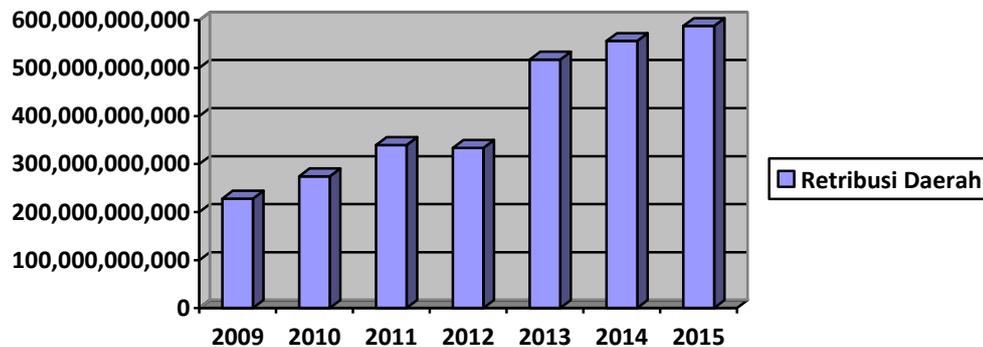
Gambar I. 4
Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang 2009 - 2015

Data tersebut merupakan data salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, yaitu merupakan data penerimaan pajak daerah Kabupaten Pandeglang mulai tahun 2009-2015. Berdasarkan data di atas tingkat penerimaan pajak daerah Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan dan penurunan, seperti pada tahun 2009 penerimaan pajak daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 4,6 miliar, kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan sehingga pendapatan pajak daerahnya menjadi 4,5 miliar, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 6,6 miliar.

Faktor kedua yang mempengaruhi pendapatan asli daerah suatu provinsi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu penyumbang

pemasukan terbesar untuk peningkatan pendapatan suatu daerah setiap tahunnya.

Menurut data yang ada dapat dilihat sebagai berikut :

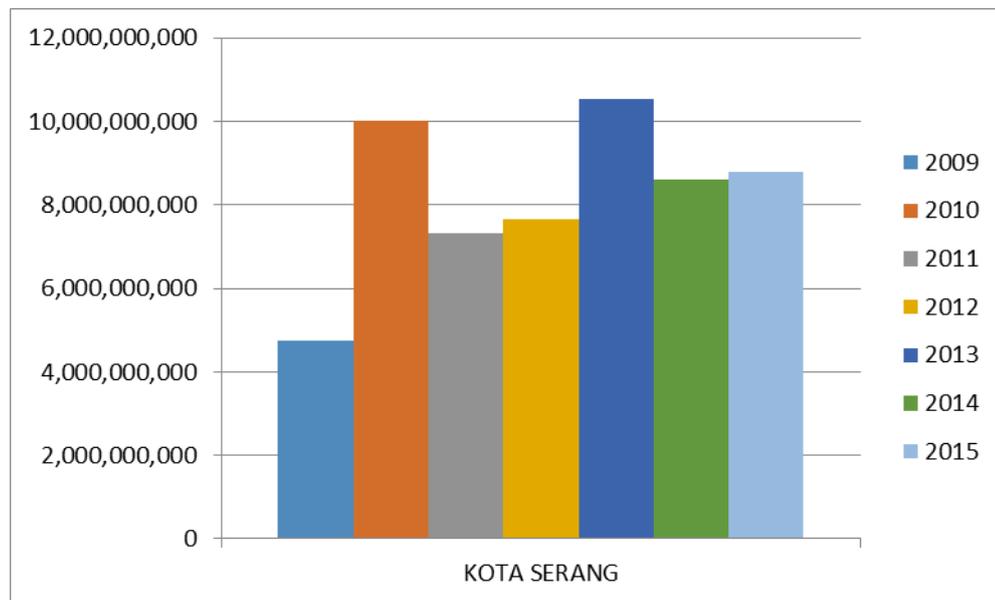


Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Gambar I. 5
Retribusi Daerah Provinsi Banten Tahun 2009-2015

Data retribusi daerah tersebut merupakan data penerimaan retribusi daerah Provinsi Banten tahun 2009-2015. Berdasarkan data diatas dapat kitalihat bahwa tingkat penerimaan retribusi daerah di Provinsi Banten mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu pada tahun 2011 retribusi daerah yang diterima sebesar 339 miliar, kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 333 miliar, dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali menjadi 517 miliar.

Data diatas merupakan data akhir penerimaan retribusi daerah yang diterima oleh Provinsi Banten yaitu berasal dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Jika kita melihat data penerimaan retribusi daerah di salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, maka dapat kita lihat sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar I. 6
Retribusi Daerah Kota Serang Tahun 2009-2015

Data diatas merupakan data penerimaan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, yaitu data penerimaan retribusi daerah Kota Serang tahun 2009-2015. Berdasarkan data diatas dapat kita lihat penerimaan retribusi daerah di Kota Serang mengalami kenaikan dan penurunan. Seperti pada tahun 2010 penerimaan retribusi daerah Kota Serang sebesar 10 miliar, namun pada tahun 2011 penerimaan retribusi daerahnya menurun menjadi 7,3 miliar, lalu pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 7,6 miliar, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 10,5 miliar, namun pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 8,5 miliar, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali menjadi 8,7 miliar.

Faktor ketiga dan keempat adalah hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatn asli daerah. Kedua faktor ini tidak memiliki sumbangsih sebesar pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Setelah melihat permasalahan yang ada diatas, dimana terdapat ketidak setabilan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, maka peneliti ingin melihat bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapaan Asli Daerah di Provinsi Banten.
2. Pengaruh Reribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.
3. Pengaruh Hasil Perusahaan Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.
4. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah yang timbul dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahaas semua masalah didalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.
2. Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten selama periode tahun 2009-2015, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Banten ?
2. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Banten ?
3. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Banten ?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Teoretis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah khususnya dalam hal Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, kemudian dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian kearah pengembangan kapasitas intelektual mahasiswa.